

Forum Freedom 59, 3 Juli 2006

Tema: Republik & Kebebasan Politik

Nara sumber : Akhmad Sahal

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

HB

Halo selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Ini adalah satu program kerjasama antara Freedom Institut dan KBR 68 H, dan disiarkan ke 50-an radio lain di seluruh Indonesia. Tema kita pagi ini mengenai "Republik dan Kebebasan Politik". Tamu saya kali ini Ahmad Sahal. Ia pernah menjabat sebagai Deputy Direktur Freedom Institut. Ia baru saja menyelesaikan studi masternya di New York University. Sekarang ia mendapatkan beasiswa dari Benjamin Franklin Foundation untuk melanjutkan study Ph.D di University of Pennsylvania. Ia sekarang sedang liburan dan sebentar lagi akan melanjutkan studinya. Karena itu kita punya kesempatan berbincang-bincang dan bertanya kepadanya. Selamat pagi Sahal..

Ahmad Sahal

Selamat pagi Hamid...

HB

Begitu duduk perkaranya. Republik itu merupakan satu bentuk pemerintahan yang diterima secara *taken for granted*, yang diterima begitu saja. Orang jarang merenungkannya kembali. Bentuk pemerintahan ini seringkali dilawankan/dihadapkan dengan bentuk kerajaan. Di Indonesia sendiri kata 'republik' ini melekat dalam bentuk lain/aneh: TVRI, Peruri, Damri, dst. Kita lupa bahwa alpabet 'R'di sana mempunyai makna yang kuat dan latar belakang yang panjang. Paham republik atau republikanisme ini digemakan pertama kali oleh Machiavelli, orang yang dianggap berpandangan buruk dalam politik Italia abad 16. Lalu paham itu dikembangkan oleh James Harrington, Montesque, Rosseau, dan para pendiri Amerika. Ide republikanisme ini kemudian menjadi acuan kebebasan politik di barat. Ide-ide ini mencakup *citizenship*; mencakup *rule of law* yang diterima secara luas dengan macam-macam gradasi pelaksanaannya. Singkatnya, ide republik ini menjadi bentuk negara yang dominan, dan sebagian besar negara di belahan dunia menganut/mengadopsi ide ini. Bung Sahal, bagaimana sebenarnya debat tentang republikanisme dalam pemikiran politik itu?

AS

Terima kasih. Ide republik Machiavelli sebenarnya adalah sebuah tawaran atau gagasan di Abad 16 ketika semangat renaissance berkumandang, semangat menghidupkan kembali tradisi Yunani-Romawi. Saat itu Machiavelli resah melihat keruntuhan negara kota, di Florence dan di Italia pada umumnya. Ya, Machiavelli resah dan bertanya: kenapa dulu Romawi bisa mencapai kejayaan? Apa resep dari kejayaan Romawi? Itu pertanyaan Machiavelli. Dia kemudian menulis satu buku yang berjudul *Discourse*, yang di Indonesia sendiri buku itu kurang diperhatikan. Buku itu membahas tentang muasal kejayaan Romawi.

Jadi obsesi Machiavelli itu sebenarnya tentang kejayaan atau kebesaran sebuah negara kota, sebuah bangsa, sebuah komunitas politik pada saat itu. Menurut dia, yang menjadikan Romawi besar dan jaya adalah karena mengembangkan kebebasan. Jadi kata kuncinya adalah kebebasan.

Menurut Machiavelli, sebuah negara disebut bebas kalau negara itu lepas dari dominasi. Di sini kata kuncinya anti-dominasi. Baik dominasi dari dalam, yaitu bentuk tirani kerajaan maupun dominasi dari luar, yaitu penjajahan. Jadi negara itu disebut bebas kalau negara itu bisa memerintah diri sendiri. Itu kelihatannya sederhana. Tapi saat itu menjadi luar biasa karena dengan begitu dia mendasarkan legitimasi dari satu tatanan politik: pada kebebasan warga.

HB

Jadi kebebasan di sini adalah kebebasan warga negara?

AS

Ya, tapi itu dijadikan sarana untuk menciptakan negara yang bebas. Jadi pengertian negara yang bebas itu adalah negara yang tidak didominasi oleh siapapun. Dan dengan cara itulah kebesaran bisa tercapai.

HB

Tetapi yang elementer dan normatif seperti penguasa dan susunan pemerintahan tetap ada?

AS

Ya, ada. Memang pada saat itu belum ada kebebasan individu seperti yang dipahami kaum liberal. Tapi dia (Machiavelli) di sana lebih memusatkan perhatiannya pada cara pencapaian negara bebas. Dalam hal ini menurutnya ada dua hal. Pertama dengan membangkitkan *civic virtue*, kebajikan publik/*civic*. Jadi setiap individu itu (diharuskan) mempunyai dorongan kuat untuk mementingkan publik. Bukan mementingkan dirinya. Kedua, masih terkait dengan *civic virtue*, adalah bahwa kebebasan itu bisa tercapai kalau ada aturan hukum, ada supremasi hukum. Ini saya kira salah satu kunci dari republikanisme. Dan sekarang sudah diterima (lazim).

Jadi orang itu bebas kalau dia mengikuti hukum. Ini sesuatu yang menarik. Jadi kebebasan adalah kepatuhan pada hukum yang ditetapkan pada dirinya sendiri. Seperti saya katakan tadi, ada partisipasi publik atau kecenderungan individu/publik untuk memikirkan kepentingan publik. Partisipasi itu menyangkut pembuatan hukum. Hukum itu dibikin oleh mereka sendiri. Dalam hal ini mereka akan bebas kalau mereka mengikuti hukum yang mereka ciptakan sendiri. Itu obsesi yang diciptakan Machiavelli. Kemudian kita lihat bahwa dari situlah rumusan keadilan dalam tatanan politik diciptakan. Jadi keadilan di situ artinya kesetaraan di depan hukum.

HB

Keadilan bagi semua warga negara?

AS

Ya. Jadi tidak peduli dari golongan mana pun, meskipun pada saat itu masih bias, bias laki-laki.

HB

Ningrat-ningratan atau kelas bangsawan sudah tidak ada?

AS

Ya. Kelas bangsawan dianggap lumer. Jadi keadilan dalam arti republikan adalah kesetaraan di depan hukum. Ini merupakan konsep politik yang berkembang sebelum demokrasi diterima sebagai sebuah acuan. Tradisi republik ini menjadi suatu cara untuk membatasi kekuasaan yang tak terbatas, misalnya dari monarki.

HB

Konsep republik ini mendahului demokrasi. Jadi pada saat itu Machiavelli dan kaum patriot sejamannya tidak menyebut-nyebut demokrasi ya?

AS

Tidak. Justru Machiavelli menganggap pandangan atau pendapat rakyat jelata itu tidak bisa diandalkan, tidak canggih. Jadi ini sebenarnya satu elemen penting dalam kehidupan bernegara yang sedang ditegakkan, yaitu *rule of law*. Kemudian sekarang turunannya adalah konstitusionalisme. Anda pasti kenal istilah *recht staat*. Ini adalah inti dari republik.

HB

Ini yang menarik. Tadi Anda bilang bahwa orang itu merasa bebas atau kebebasannya makin terjamin justru kalau dia mengikuti hukum. Hukum yang dibikin oleh mereka sendiri. Ini harus dijelaskan karena bisa timbul salah paham. Ini maksudnya bagaimana? Tanpa perwakilankah?

AS

Dalam konteks republik, saya kira pengertiannya adalah—kalau kita terjemahkan sekarang—hukum yang dirumuskan berdasarkan satu keputusan bersama yang sifatnya demokratis.

HB

Jadi ada deliberasi ya?

AS

Ya, ada semacam perdebatan publik yang melibatkan rakyat banyak atau melibatkan suara publik untuk memunculkan hukum seperti itu. Tapi problemnya sekarang adalah apakah hukum yang sesuai dengan tradisi republikan itu menjamin kebebasan warganya dari dominasi pihak lain? Jadi sebenarnya hukum yang dimaksud dalam tradisi republik adalah hukum yang memungkinkan setiap warga negara menikmati dan menjalankan kebebasannya tanpa takut ada dominasi dari pihak lain, di sini bisa (dominasi) negara dan elemen masyarakat. Jadi hukum yang memungkinkan terjadinya kebebasan. Ini yang penting.

HB

Biasanya satu konsep atau satu ide akan semakin jelas kalau disandingkan atau dibandingkan dengan konsep lain. Dalam konteks republik ini, apa yang membedakannya dengan sistem-sistem lain? Misalnya dengan kerajaan?

AS

Perbedaannya sangat jelas. Dalam kerajaan itu yang berkuasa adalah 'Daulat Tuanku'. Jadi yang mempunyai keputusan terakhir adalah seseorang atau sekelompok orang yang tentu saja bisa sewenang-wenang.

HB

Karena merasa dipilih langsung dari langit?

AS

Ya, tapi tidak harus dari langit. Bisa saja raja merasa punya legitimasi dari dewa matahari. Tetapi yang pasti keputusan itu berada di tangan seseorang atau sekelompok orang, dan itu berpotensi dan sangat memungkinkan munculnya sikap yang sewenang-wenang.

HB

Tadi Sahal sudah bicara cukup banyak dan jelas. Ia pun sudah menguraikan perbedaan bentuk republik dan kerajaan. Perbedaannya sangat jelas. Istilah republik sendiri berasal dari *res publica*, urusan orang banyak. Sementara kerajaan adalah urusannya sang raja dan kerabatnya. Yang menarik dari perbincangan kita saat ini: waktu menggagas ide republik pada Abad 16 di Italia, Machiavelli tidak menyebut-nyebut demokrasi. Jadi ide republik ini mendahului demokrasi. Lalu apa kaitan antara republik dan demokrasi ini?

AS

Itu tidak bertentangan tetapi punya perbedaan. Tidak mesti bertentangan, tapi ada beberapa perbedaan. Tidak bertentangnya begini: sebenarnya kalau kita mengikuti alur dari tradisi republik atau republikanisme, kita tahu para penganjur ide republik itu menghendaki adanya kesetaraan di depan hukum. Prinsip utamanya adalah prinsip *equality*. Jadi implikasi dari kesetaraan di depan hukum itu berlanjut pada persamaan dalam membikin hukum. Jadi secara teoritis, tradisi republik itu akan bermuara kepada demokrasi. Karena demokrasi itu sendiri pada dasarnya adalah *self-government*. Demokrasi adalah bagaimana masyarakat mengatur diri mereka sendiri melalui satu cara untuk menentukan pemimpinnya lewat pemilihan umum.

Jadi *self government* itu adalah satu ciri yang sebenarnya kelanjutan dari prinsip kesetaraan tadi. Tetapi dalam sejarahnya, kita tahu bahwa yang pertama kali berhasil mengembangkan demokrasi sebagai satu sistem politik itu kan Amerika Serikat. Kemudian pertanyaan waktu itu di dalam konteks Amerika adalah: bagaimana satu masyarakat yang pada dasarnya sama bisa mengelola satu pemerintahan tanpa kekerasan? Jadi apa yang membuat orang bisa menerima orang lain yang sama dengan saya dan berkuasa terhadap saya tanpa membuat saya *ngamuk-ngamuk*?

HB

Gampangnya begini: saya dengan yang lain itu sama. Saya tidak berkuasa tapi yang lain berkuasa dan menguasai saya?

AS

Betul. Jadi apa yang mendasari saya yang tidak berkuasa dan dikuasai orang lain untuk tidak melakukan kekerasan. Pengalaman di Amerika kemudian menemukan dan mengembangkan demokrasi representatif, demokrasi yang sekarang kita kenal. Tapi intinya adalah bahwa demokrasi itu adalah *self government*. Masyarakat yang memerintah dirinya sendiri. Tetapi pada sisi lain, bisa juga menimbulkan masalah. Jadi salah satu elemen penting dari republik adalah kepentingan umum, *res publica*. *Res publica* itu perwujudan konkritnya adalah hukum. Jadi hukum itu adalah cerminan dari aspirasi publik. Karena kalau publik mengikuti hukum, berarti mereka mengikuti dirinya sendiri. Nah masalahnya, dalam prakteknya tidak selalu seluruh warga negara itu mementingkan kepentingan publik.

HB

Bahkan ada kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri sambil merugikan kepentingan umum?

AS

Ya, kadang-kadang secara tidak disadari atau malah disadari merugikan kepentingan umum. Jadi ada kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan publik; mengabaikan *res publica* demi mengejar kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau kita mengikuti sistem demokrasi di mana pemerintah dipilih menurut suara terbanyak, (itu kerap memunculkan dilema:) bagaimana kalau sekelompok orang yang mementingkan kepentingan kelompoknya itu mempunyai suara terbanyak.

HB

Katakanlah satu partai mendapatkan 60 persen suara. Partai itu kemudian dapat mandat untuk memerintah. Tetapi ketika memerintah, partai itu mementingkan kelompoknya sendiri. Padahal sebenarnya partai yang memerintah itu mestinya memikirkan warga-warga yang tidak mendukungnya. Bagaimana kita mengatasinya?

AS

Atau kemudian partai itu memunculkan peraturan-peraturan yang tidak lagi disemangati *res publica*. Karena ukuran *res publica* itu sebenarnya adalah seberapa jauh pihak-pihak yang kalah—dalam hal ini kelompok minoritas atau bahkan individu—tetap terjamin kebebasannya. Kita sudah bahas tadi bahwa sebenarnya hukumlah yang memungkinkan setiap warga menjalankan dan menikmati kebebasannya. Kebebasan untuk mengaktualisasikan diri mereka sendiri tanpa dominasi. Nah bagaimana kalau demokrasi sebagai sebuah sistem itu menampung sekelompok yang kebetulan mayoritas yang memenangkan dengan cara-cara demokratis, tapi menelorkan/membuat keputusan-keputusan yang mengancam tadi

Di sinilah menurut saya demokrasi tidak bisa berjalan sendirian. Karena itu kita mengenal ide mengenai konstitusionalisme. Ide mengenai konstitusionalisme ini merupakan perkembangan lebih canggih dari gagasan *rule of law*; dari gagasan supremasi hukum yang menjadi ideal atau nilai utama dari tradisi republik. Dan konstitusionalisme ini adalah semacam cara untuk menghindarkan demokrasi dari tirani mayoritas; cara untuk menghindarkan kesewenang-wenangan. Karena kesewenang-wenangan itu bisa dimunculkan oleh satu orang (raja), sekelompok orang, dan banyak orang.

HB

Sama seperti Partai Komunis Cina yang anggotanya 50 juta itu bisa menguasai penduduk Cina yang jumlahnya 1,3 milyar. 50 juta anggota ini menguasai 1,3 milyar penduduk?

AS

Meskipun kita sepakat bahwa demokrasi sebagai satu prosedur adalah pemerintahan oleh suara mayoritas. Tetapi kita harus ingat tujuan demokrasi itu. Tujuan demokrasi itu adalah mengaktualisasikan cita-cita republik. Cita-cita republik adalah bagaimana supaya setiap masyarakat atau warga itu bisa menjalankan hidupnya; mengaktualisasikan potensi-potensi terbaik dalam dirinya tanpa dominasi dari orang lain. Tanpa dominasi pihak lain. Makanya ada yang namanya konstitusi, yang menjamin hak-hak.

HB

Kalau kita perhatikan perkembangan-perkembangan terbaru dalam pemikiran demokrasi, justru semakin menekankan hak-hak minoritas. Mungkin karena kekhawatiran itu ya?

AS

Kita lihat tradisi di negara-negara yang demokrasinya lebih matang, misalnya di Amerika Serikat. Di sana kita mengenal amandemen pertama. Ada hak-hak yang bisa dihapus, *unalienable*, oleh suara terbanyak. Hak-hak itu dasarnya dari mana? Itulah hal-hal yang perlu kita tegaskan. Bahwa hak-hak itu dasarnya dari cita-cita republik yang tidak lain adalah melindungi kebebasan setiap warga. Ini menjadi tantangan di Indonesia. Karena dari segi konstitusi, kita sebenarnya sudah cukup peduli dengan hak-hak itu; dengan pentingnya perlindungan hak-hak bagi minoritas meski dalam beberapa hal belum sempurna. Tapi arahnya sudah bagus.

Belakangan ini kita sering mendengar perbincangan orang tentang Perda syariat dan RUU APP. Mereka mengatakan, "Lho, kita ini mayoritas, jadi minoritas harus dengar dong! Jangan ngeyel..." Seakan-akan yang paling menentukan segala-galanya adalah mayoritas. Tanpa mereka peduli apakah produk-produknya itu bertentangan dengan hal-hal yang dirumuskan dalam konstitusi. Jadi ini problem pelik dalam demokrasi kalau demokrasi dilepaskan dari bingkai republik.

HB

Ini menarik sekali. Anda sudah memunculkan ide yang menarik sekali: *unalienable right*. Orang jarang *me-refer* itu. Katakanlah dalam kasus kita misalnya pemaksaan terhadap kaum non-muslim untuk mengikuti syariat Islam. Sesuatu yang sangat ganjil. Ini harus dicari pendasarannya. Anda melihat bahwa pendasarannya/legitimasinya itu harus dicari di luar demokrasi?

AS

Betul. Di luar demokrasi sebagai prosedur.

HB

Jadi ada penampung lain, yaitu republik?

AS

Ya. Dan kalau diterjemahkan dalam konteks ketatanegaraan sekarang itu adalah konstitusi.

HB

Jadi yang harus diperkuat itu paham konstitusionalisme?

AS

Betul. Jadi ada seorang professor di Amerika yang menganalogkan demokrasi itu dengan Odysseus. Odysseus itu adalah salah satu tokoh dalam mitologi Yunani. Dia berlayar ke laut lepas dan meminta kepada awak kapalnya untuk diikat di tiang kapalnya. Ya, karena dia tahu akan ada godaan dari Sirens. Kemudian dia secara sadar minta diikat. Karena kalau tidak, dia akan tergoda pada Sirens yang jelita itu. Nah demokrasi dalam beberapa hal itu harus diikat oleh konstitusi. Karena kalau tidak, demokrasi bisa jatuh pada tirani mayoritas. Dan itu malah merugikan, menodai, mencederai cita-cita republik.

HB

Sayang waktunya habis. Lain kali kita akan membahas kaitan republik dengan ide-ide lain: sekularisme, liberalisme, dsb. Barangkali kita pun akan mengelindangkannya dengan Pancasila. Begitulah akhir Forum freedom. Terima kasih...